

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN POLA USAHA BERSAMA DI DESA BELANTING SAMBALIA LOMBOK TIMUR

Hailuddin^{*1} dan Sofiati Wardah²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, AMM, Mataram

^{*}Korespondensi: didin@unram.ac.id

Diterima 10 Oktober 2019 / Disetujui 9 Desember 2019

ABSTRAK

Pengembangan ekonomi masyarakat terutama yang bergerak di level ekonomi usaha kecil dan mikro dimaksudkan untuk penggalan potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya potensial yang berkelanjutan. Dengan harapan penguasaan, kontrol, dan pengelolaan usaha akan lebih mandiri. Kegiatan ini dilakukan pada kelompok maupun individu para pelaku usaha di Desa Belanting Lombok Timur. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan ramah tamah. Pada prinsipnya mengembangkan ekonomi strategis berbasis potensi lokal berdasarkan akar budaya/lokal, dan kearifan lokal masyarakat, sehingga perlu menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat kecil atas dasar keswadayaan dan kemandirian. Penguatan-penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem perekonomian kolektif dan penguatan permodalan secara swadaya dan mandiri menjadi sangat penting untuk dibangun. Oleh karena itu, pola usaha bersama dalam wadah kelompok sangat penting dibangun untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Materi inilah yang menjadi penekanan saat penyuluhan, disamping memberikan pengetahuan tentang manajemen usaha dan proses produksinya. Dengan demikian mereka diharapkan lebih baik dan mampu mengelola usahanya secara mandiri dan lebih berkembang.

Kata kunci: usaha mikro, usaha bersama, penguatan institusi.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi kemandirian ekonomi rakyat untuk pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Karena itu pengembangan ekonomi masyarakat mesti berlandaskan pada sarana produksi dan proses produksi

yang berada dalam penguasaan, kontrol dan pengelolaan masyarakat itu sendiri, melalui pola;

- Mengembangkan ekonomi strategis berbasis potensi lokal berdasarkan akar budaya/lokal wisdom-kearifan lokal masyarakat.
- Menumbuhkembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis

rakyat atas dasar keswadayaan dan kemandirian.

- Penguatan–penguatan institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem perekonomian kolektif dan penguatan permodalan secara swadaya dan mandiri.

Tidak dapat disangkal bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (*political will*), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil (kita tidak membuat penilaian terhadap sistem JPS), adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak manapun, termasuk rakyat kecil sendiri (Ignas, 2000). Pendekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan *affirmative action*. Aksi membagi-bagi uang secara tidak sadar menyebabkan usaha kecil-menengah dan koperasi yang selama ini tidak berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada aksi dimaksud. Sebenarnya yang harus ada pada tangan obyek *affirmative action* adalah kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukan *cash money/cash material*. Jika pemahaman ini tidak dibangun sejak awal, maka kita khawatir cerita keberpihakan

yang salah selama masa orde baru kembali akan terulang.

Selanjutnya, pemerintah harus mempunyai ancangan yang pasti tentang kapan seharusnya pemerintah mengurangi bentuk campur tangan dalam *affirmative action* policy-nya, untuk mendorong ekonomi kerakyatan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian ekonomi yang akurat tentang timing dan process di mana pemerintah harus mengurangi bentuk keberpihakan-nya pada usaha kecil-menengah dan koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat. Isu ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena sampai saat ini masih banyak pihak (di luar UKM dan Koperasi) yang memanfaatkan momen keberpihakan pemerintah ini sebagai *free-rider*.

Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat desa, sehingga pada saatnya setiap masyarakat dapat berprestasi dan merupakan pelaku pembangunan untuk menunjang pembangunan nasional. Pembangunan desa ini merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat baik itu pemerintah maupun swasta, termasuk juga tanggung jawab perguruan tinggi beserta civitas akademiknya. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus menunjang pembangunan desa pada khususnya.

Usaha skala kecil merupakan salah satu usaha yang dapat menciptakan tenaga kerja baru dan sebagai penunjang

pembangunan ekonomi yang erat kaitannya dengan usaha nasional. Usaha ini mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi. Dimana usaha berskala kecil ini mampu memperluas kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan dapat pula meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus mampu menciptakan stabilitas ekonomi.

Pembinaan dan pengembangan usaha berskala kecil khususnya telah lama mendapat perhatian pemerintah dan swasta. Bentuk perhatian diwujudkan dalam upaya pembinaan dan pengembangan seperti penyuluhan, pendidikan pelatihan, motivasi, konsultasi, studi banding serta dalam bentuk lainnya yang mengarah pada perbaikan mutu usaha.

Jenis usaha cukup banyak dan beraneka ragam bentuknya yang tersebar di daerah perkotaan maupun perdesaan. Banyak masyarakat terlibat di dalamnya dan bahkan menjadi sumber mata pencaharian utama. Oleh karena itu, pembinaan dan penyuluhan tetap harus dilaksanakan meskipun belum keseluruhannya merata yang ada, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Desa Belanting sebagai salah satu wilayah yang terus berkembang di Lombok Timur, masyarakatnya memiliki berbagai macam kegiatan usaha yang dikelola sebagai sumber penghidupan mereka. Bentuk usaha yang banyak dilakukan

adalah usaha tani, nelayan, dan dagang kecil yang umumnya dikelola dengan modal relatif kecil. Meski demikian usaha semacam ini cukup mampu berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja khususnya pada masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, pemberdayaan usaha mereka merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus menjaga eksistensinya, yang pada akhirnya akan berkontribusi secara lokal maupun regional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pola pembinaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat adalah dengan memperkuat pendidikan/pelatihan dan penyuluhan serta pendampingan. Untuk memperkuat kelembagaan usaha mereka, pola kemitraan atau usaha bersama/berkelompok menjadi salah satu alternatifnya. Hal ini tentu menjadi tanggung banyak pihak terutama pemerintah daerah, perguruan tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan perhatian demikian diharap hal ini akan mendorong dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras dan giat.

Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar. Perlu dipahami bahwa dalam ruang

ekonomi nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi (konglomerat) dengan bentuk usaha yang kontras dengan apa yang diragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat (Halim, 2001; 38).

Memiliki modal yang besar, mempunyai akses pasar yang luas, menguasai usaha dari hulu ke hilir, menguasai teknologi produksi dan manajemen usaha modern. Kelompok usaha ini jumlahnya hanya sedikit sehingga tidak merupakan representasi dari kondisi ekonomi rakyat yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, usaha ekonomi yang diragakan bernilai ekstrim terhadap totalitas ekonomi nasional (Kuncoro, 2004).

Ekonomi rakyat pada umumnya merupakan kelompok ekonomi yang dilola oleh masyarakat kebanyakan. Dan mereka ini menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat pada umumnya. Bentuk usaha mereka juga didominasi oleh usaha mikro dan kecil. Mengingat pola pembentukannya sangat sederhana dengan modal secukupnya, maka semua orang bisa melakukannya. Sehingga dengan demikian kelompok usaha macam ini mendominasi jenis usaha yang ada saat ini (lebih dari 95%) di Indonesia (Hailuddin, 2007).

Pada umumnya usaha berskala kecil rentan terhadap persaingan, permodalan dan sumber bahan bakunya. Oleh karena pola kemitraan dan usaha bersama/berkelompok menjadi alternatif yang tepat

untuk melindungi dan pemecahan masalah.

Pengertian kemitraan dan usaha bersama/berkelompok adalah perkumpulan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan, dalam dalam hal ini untuk mendapatkan harga beli yang lebih murah dengan menjual kembali dengan harga yang wajar dan menguntungkan, sehingga dapat bersaing dengan penjual/pengusaha yang memiliki usaha sejenis.

Menurut Sumadiwijo (1986), bahwa kemitraan atau usaha bersama/berkelompok adalah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang dengan jalan kerjasama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama, menyelenggarakan pembelian dan penjualan barang dagangan yang mereka usahakan.

Kemitraan atau usaha bersama/berkelompok itu adalah perkumpulan orang-orang yang atas dasar kesamaan keadilan dan kebebasan bekerjasama dalam lapangan usaha seperti aktivitas ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jika wadah kelompok usaha bersama ini sudah mapan dan organisasinya sudah kuat, maka pada tahapan selanjutnya kelompok ini dapat menjadi cikal bakal Koperasi Pedesaan, yang dapat disinergikan dengan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang saat ini cukup intensif dikembangkan di banyak perdesaan di Indonesia.

Mengacu pada analisis situasi di atas, dimana pengamatan awal yang telah dilakukan terhadap para pelaku usaha mikro/kecil, diketahui bahwa masalah yang dihadapi sangat kompleks, yang satu sama lainnya saling berkaitan, antara lain:

- Belum adanya wadah bagi mereka untuk membentuk suatu kekuatan yang dapat saling membantu dalam proses usaha maupun pemasaran.
- Pengelolaan usaha masih dilakukan secara tradisional, semua kegiatan usahanya ditangani sendiri.
- Belum ada pembinaan dan pendampingan usaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan berusaha dari pihak eksternal.

Banyak faktor yang menentukan kemampuan dalam pengembangan usaha masyarakat khususnya pada usaha sektor informal. Dalam penyuluhan dan pembinaan ini perhatian utama diarahkan pada faktor-faktor yang mendukung dalam pemberdayaan usaha dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha. Kemudian pada akhirnya mereka dapat meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan pengembangan usaha khususnya usaha yang mereka kelola.

Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya peningkatan kemampuan dan ketrampilan para pelaku usaha dalam mengembangkan dan mengelola usahanya. Mereka menjadi

termotivasi dan menyadari akan perlunya ada kerja keras dan keuletan dalam memperlancar usahanya, juga mengetahui manfaat dalam pencatatan/pembukuan di bidang usahanya.

METODE KEGIATAN

1. Realisasi Pemecahan Masalah

Guna membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi oleh para peserta, maka pemecahan masalahnya adalah mengajak mereka agar masuk atau mendirikan kemitraan usaha yang dapat menampung dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Disamping itu diberikan pengetahuan tentang manajemen usaha. Oleh karena itu melalui penyuluhan ini mereka mengerti tentang cara melakukan perencanaan dan pengelolaan usaha; cara pembukuan sederhana; sehingga mereka termotivasi untuk berusaha dengan tekun dan dapat mengelola usahanya dengan lebih baik, sehingga dapat lebih berkembang.

2. Khalayak sasaran antara yang strategis
Sebagai obyek dari kegiatan ini adalah para pelaku usaha kecil/mikro yang berada dan beraktivitas dalam mengelola usahanya di wilayah Belanting Sambalia Lombok Timur.

3. Metode kegiatan

Kegiatan penyuluhan kepada para peserta dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan dilanjutkan dengan ramah

tamah tentang berbagai hal yang menyangkut masalah usaha yang mereka lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para peserta mendapat pengetahuan yang sangat mendasar dalam mengelola usahanya, baik dalam hal pembukuan sederhana dan manajemen usaha yang meliputi :

1. Pengelolaan usaha: bagaimana cara mengelola usahanya sehingga tujuan itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat dan pentingnya kemitraan dan usaha bersama: Manfaat apa yang bisa diperoleh masyarakat umum dengan adanya jalinan usaha serta menjelaskan pentingnya kerjasama atau bermitra, bagi kesejahteraan pelaku usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Manajemen usaha, terutama masalah pembukuan usaha, prinsip dan penyuluhan keuangan dan pengelolaan modal.

Metode dan isi materi mendapat sambutan baik dari para peserta penyuluhan, yang mencerminkan kebutuhan mereka untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan kegiatan usaha yang sedang ditekuninya, baik sebagai petani maupun sebagai pedagang dan lainnya. Keseriusan Tim Penyuluh dalam

melaksanakan kegiatan ini merupakan modal utama (faktor pendorong) untuk mengatasi kekurangan pengetahuan dan ketrampilan usaha, sekalipun belum sepenuhnya teratasi.

Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat, sehingga tidak dapat memberi kemungkinan tambahan jadwal yang sebenarnya diperlukan. Disamping itu keterbatasan dana menyebabkan terbatasnya para peserta yang dapat mengikuti penyuluhan semacam ini. Untuk itu perlu ada upaya lanjutan kegiatan penyuluhan dengan jumlah peserta yang lebih besar.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para peserta, telah banyak dikemukakan oleh warga Belanting Sambalia Lombok Timur. Karenanya kerangka pemecahan masalah adalah mengarahkan mereka agar mau bermitra dan usaha berkelompok baik dalam usaha sejenis maupun lintas usaha. Dengan demikian mereka mampu mengatasi kekurangan modal, meningkatkan keterampilan berusaha dan saling bantu dalam pemasaran. Hal ini sanggup memberikan motivasi kepada mereka dalam berusaha. Adapun materi yang telah disampaikan meliputi:

- Pemberdayaan mitra binaan dan usaha bersama;
- Pembukuan sederhana dalam berusaha; peranan akuntansi pada usaha mikro kecil.

- Menumbuhkan sikap dan mental berwirausaha; management meningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan ini adalah para peserta berharap kegiatan semacam ini dapat terus berkelanjutan, mengingat informasi tentang pengembangan dan pengelolaan usaha yang baik selama ini belum pernah mereka dapatkan. Mereka menjadi tahu tentang pola kemitraan usaha dan usaha kelompok serta strategi dalam menjalankan usahanya. Serta juga mengetahui tentang manajemen usaha, permodalan dan pemasaran hasil yang baik.

Saran

Oleh karena mengingat antusias peserta yang cukup baik, maka dipandang perlu ada upaya untuk melanjutkan kegiatan ini dengan jumlah peserta dan waktu penyuluhan yang lebih banyak, sehingga dalam memberikan materi penyuluhan akan lebih mengena sasaran. Dari peserta yang hadir, sebagian besar mengharapkan terbentuknya jalinan kerjasama/mitra usaha sebagai sarana usaha yang sangat potensial. Selain itu mereka juga berharap adanya interaksi intensif dengan tim Penyuluh untuk mendiskusikan permasalahan usaha yang sewaktu-waktu mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bana, M, Yahya, 2002. Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur, Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta.
- Bratakusumah, DS dan Solihin Dadang, 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT Gramedia, Jakarta.
- Hailuddin, 2007. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Mengkritisi Peran Lembaga Perbankan, Mutiara Ilmu, Bandung.
- Halim, Abdul, 2001. Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Labni, 2005. Analisis Perbandingan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Se-Pulau Sumbawa, Mataram.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2001. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta.
- Simanjuntak, Thamrin, 2001. Analisis Potensi Pendapatan Asli daerah (PAD) Kasus Kabupaten Simalungun, Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Suardana, I. Made, 2005. Analisis Strategi Pemasaran Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Mataram (Studi Kasus Pada Akademi Manajemen Mataram

Dan Akademi Sekretari Mataram),
FE. Unram, Mataram.

Sumadiwijo, 1986. Pembangunan dan
Kemiskinan. Bulan Bintang. Rajawali
Jakarta.